

Dirjen KI Soroti Naiknya Tren Pemberdayaan Perempuan di Indonesia

JAKARTA (IM) - Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (KI) Kemenkumham Min Usihon menyoroti tren peningkatan indeks pemberdayaan perempuan di Indonesia, mulai dari 64,10 poin pada 2020 menjadi 64,76 poin pada 2021 dan kembali naik menjadi 66,95 poin pada 2022.

"Dari tahun ke tahun, 2020, 2021, kemudian 2022, (indeks pemberdayaan perempuan) menunjukkan tren peningkatan," kata Min dalam seminar nasional "Perempuan Indonesia Kreatif dan Inovatif: Ekonomi Tangguh" di Jakarta, Selasa (16/5).

Seperti dikutip dari *Antara*, Min menilai peningkatan indikator tersebut menunjukkan bahwa perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan perekonomian dan politik.

Selain itu, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, sekitar 64,5 persen dari total usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dikelola oleh perempuan.

Berdasarkan Online Data System (ODS) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), per Desember 2022 terdapat 10.845 unit koperasi wanita di Indonesia.

Namun, Min menilai masih banyak peran perempuan yang bisa ditingkatkan

di berbagai bidang untuk menunjang perekonomian Indonesia. "Angka-angka yang saya sebutkan menunjukkan perempuan memiliki kapasitas yang sama dengan laki-laki dalam membuat suatu karya dari kecerdasan dan kemahirannya," katanya.

Direktorat Jenderal KI (DJKI) Kemenkumham pun mengadakan lebih banyak kegiatan yang mendorong perempuan untuk lebih berkreasi, berinovasi, dan menyadari pentingnya perlindungan serta pemanfaatan kekayaan intelektual.

"Karena tanpa perlindungan, kekayaan intelektual berpotensi disalahgunakan oleh pihak lain dan dapat merugikan para perempuan sendiri," ujar Min Usihon.

Dalam rangka peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia, DJKI Kemenkumham mengangkat tema "Perempuan Indonesia Kreatif dan Inovatif: Ekonomi Tangguh" untuk mendorong dan memacu lebih banyak perempuan memanfaatkan sistem kekayaan intelektual sebagai pelindung dan pemberi nilai tambah dalam keberlangsungan siklus kehidupan dalam berkreasi dan berinovasi. ● **osm**

2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



RAPAT PARIPURNA PEMBUKAAN MASA SIDANG V 2022-2023

Ketua DPR Puan Maharani (tengah) menyampaikan pidato saat memimpin rapat paripurna pembukaan masa sidang V tahun 2022-2023 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/5). Dalam pembukaan rapat yang digelar secara hybrid dan dihadiri 76 anggota dewan tersebut, Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato di antaranya mendesak agar pemerintah serius menangani kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua serta mempersiapkan diri terkait ancaman La Nina.

Komitmen Menteri ATR/BPN Dukung KPK Tingkatkan Indeks Antikorupsi

Hadi Tjahjanto menyebut jajarannya mendapat pembekalan dari ketua dan deputi KPK mengenai nilai-nilai anti-korupsi. Pembekalan tersebut penting untuk memitigasi niat korupsi. "Ini sangat memberikan satu masukan dan gambaran sehingga kita semua khususnya di kementerian memiliki komitmen untuk mencegah perilaku-perilaku yang kurang baik," kata Hadi.

JAKARTA (IM) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyatakan komitmennya untuk mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam meningkatkan indeks antikorupsi di Indonesia.

"Inshaallah kami berkomitmen untuk mendukung KPK agar nantinya indeks antikorupsi kita bisa naik dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia dan dilihat oleh masyarakat dunia bahwa indeks

antikorupsi di Indonesia terus naik," ujar Hadi di Gedung Merah Putih, Jakarta, seperti dikutip dari *Antara*, Selasa (16/5).

Hadi menyampaikan hal tersebut usai menghadiri agenda executive briefing atau pembekalan antikorupsi yang digelar oleh lembaga antirasuah untuk penyelenggara negara.

Dalam agenda itu, Hadi Tjahjanto didampingi istrinya, Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, serta jajaran eselon satu dari kementerian

tersebut. "Kami dari Kementerian ATR/BPN menyambut gembira dan terima kasih kepada KPK karena memberikan satu pembekalan antikorupsi untuk penyelenggara negara dan istri yang hari ini diikuti oleh pejabat eselon satu dan nanti pejabat eselon satu pun akan diberikan tambahan pembekalan," kata Hadi.

Dia menyebut jajarannya mendapat pembekalan dari ketua dan deputi KPK mengenai nilai-nilai antikorupsi. Pembekalan tersebut penting untuk memitigasi niat korupsi. "Ini sangat memberikan satu masukan dan gambaran sehingga kita semua khususnya di kementerian memiliki komitmen untuk mencegah perilaku-perilaku yang kurang baik," ucapnya.

Hadi pun mendorong direktur jenderal di Kementerian ATR/BPN untuk memberikan perhatian dan peringatan kepada jajaran eselon di bawahnya agar menghindari perilaku korupsi.

Dia menyebut sistem digi-

talisis yang sedang dibangun Kementerian ATR/BPN saat ini tidak akan maksimal apabila sumber daya manusianya tidak disiapkan dan dibekali pendidikan antikorupsi. "Apabila sistem sudah dibentuk, SDM-nya juga dipersiapkan dan semuanya takut untuk berbuat yang kurang bagus, korupsi, maka sistem ini akan bagus," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menjelaskan kegiatan executive briefing

merupakan bagian dari Program Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas).

Wawan mengatakan program tersebut adalah upaya KPK menggenjot pendidikan antikorupsi dan meningkatkan integritas, tidak hanya bagi para penyelenggara negara melainkan juga pasangannya. "Karena kita tahu, beberapa kasus yang ditangani oleh KPK ternyata juga melibatkan pasangan-pasangan dari para penyelenggara negara," katanya. ● **mar**



KEJARI BOYOLALI KEMBALIKAN KE KAS NEGARA HASIL TPPU ROKOK ILEGAL

Petugas menunjukkan barang bukti dalam kasus pencucian uang penjualan rokok ilegal di Kejaksaan Negeri Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (16/5). Kejaksaan Negeri Boyolali mengembalikan uang sejumlah Rp4,49 miliar ke kas negara hasil sitaan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) penjualan rokok ilegal dari dua tersangka pasangan suami istri asal Boyolali.

MenPAN-RB Dorong Penguatan Peran Akademisi dalam Reformasi Birokrasi

JAKARTA (IM) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdul Aziz Anas mendorong penguatan peran akademisi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Anas menjelaskan kolaborasi dan kerja sama yang sinergis antar aktor yang terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Disampaikan Anas, para akademisi menjadi salah satu aktor yang turut memiliki peran penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, berdamai dengan pemerintah, komunitas, bisnis, dan media.

"Akademisi dapat bertindak sebagai *policy entrepreneur*, di mana mereka dapat menginvestasikan dan menggunakan sumber daya yang mereka miliki untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah kebijakan untuk kemudian diusulkan solusi kebijakan atas permasalahan tersebut," ujar Anas dalam keterangan tertulis, Selasa (16/5).

Hal ini disampaikan saat menyampaikan orasi ilmiah dalam Sidang Terbuka UNJ pada pembukaan Dies Natalis ke-59 UNJ di Jakarta, Selasa (16/5).

Lebih lanjut, Anas menga-

takan akademisi berperan luas dalam menggunakan pengetahuan, kemampuan, kapabilitas, maupun materi untuk menganalisis kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah. Akademisi juga dapat memperkuat *evidence-based policy* atas hasil pengamatan dan analisis yang dilakukan berdasarkan data dan informasi yang berkembang di masyarakat.

Di sisi lain, kata Anas, para akademisi juga berperan untuk memastikan tujuan dan target pembangunan tercapai. Oleh karena itu, akademisi dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat.

"Dosen dapat menginternalisasi dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sementara mahasiswa dapat membantu implementasi kebijakan tersebut kepada masyarakat," imbuhnya.

Mantan Kepala LKPP ini pun menyampaikan saat masih menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, ia kerap mengajak mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran ibu hamil terkait pentingnya memperhatikan nutrisi dan gizi bayi sejak dalam kandungan. ● **dro**

SMRC: Ada Kecocokan Antara PSI dan Gibran

JAKARTA (IM) - Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC)

Saidiman Ahmad berpandangan bahwa terdapat kecocokan antara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam merepresentasikan generasi muda.

"PSI adalah partai politik baru yang secara sadar menasar kelompok pemilih muda. Ini cocok dengan sosok Gibran yang muda dan terlihat inovatif. Saya kira, baik PSI maupun Gibran sama-sama penting untuk saling mengasosiasikan diri," kata Saidiman dalam

keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (16/5).

Saidiman juga menyoroti terkait gagasan Jokowiisme PSI. Ia menjelaskan bahwa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) saat ini memang populer

Saidiman melanjutkan tingkat kepuasan publik pada kinerja Jokowi sangat tinggi, yakni di atas 75 persen, bahkan mencapai 80 persen. "Jokowi dinilai berhasil dalam banyak aspek pembangunan ekonomi. Karena itu banyak partai yang ingin mengasosiasikan diri dengan keberhasilan ini, salah satunya dengan membawa semangat Jokowi,"

ujar Saidiman.

Lebih jauh Saidiman menilai partai pimpinan Giring Nidji itu sampai sekarang memang sangat setia dengan Jokowi. Dukungan PSI kepada Jokowi bukanlah hal baru.

Sebelumnya, pada puncak acara musyawarah rakyat (musra) melawan Jokowi, sejumlah kader PSI juga terlihat hadir dan menempati tempat duduk di jajaran depan. "Dan saya melihat PSI memang sejak awal menjadi partai loyalis Jokowi yang sangat konsisten, bukan sekarang ini saja, tapi sejak Pemilu 2019," kata Saidiman. ● **dot**



PEMBUKAAN RAKORNAS TRANSMIGRASI 2023

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menyampaikan paparan saat pembukaan Rakornas Transmigrasi 2023 bertajuk "Transmigrasi Modern untuk Indonesia Sejahtera" di Grha Sabha Pramana (GSP) UGM, Sleman, D.I Yogyakarta, Selasa (16/5). Acara yang dihadiri sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia itu membahas esensi utama dari program transmigrasi dari sisi aspek spasial serta demografi.

Puan Beberkan Fungsi Pengawasan AKD DPR RI

JAKARTA (IM) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa fungsi pengawasan DPR akan diarahkan pada berbagai isu, permasalahan dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap alat kelengkapan dewan (AKD).

Ia mengatakan pelaksanaan fungsi pengawasan AKD DPR RI juga akan difokuskan terhadap berbagai permasalahan yang juga menjadi perhatian rakyat. Pertama, maraknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

"Kedua, permasalahan kasus kekerasan pada pekerja migran Indonesia," ujar Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, seperti dikutip dari *Antara*, Selasa (16/5).

Selanjutnya, ketiga, perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan (nakes). Keempat, proses pengangkatan guru ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan kelima adalah persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023.

DPR RI juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi, harga, dan ketersediaan pangan selama periode Ramadhan dan Lebaran. Meskipun kenaikan harga komoditas tetap terjadi, namun masih dalam batas kendali dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Puan menambahkan DPR RI menaruh perhatian terhadap cuaca panas ekstrem yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Adapun DPR RI bersama Pemerintah akan melakukan berbagai langkah antisipatif untuk meminimalisasi dampak cuaca ekstrem, seperti penurunan kualitas udara, meningkatnya kondisi kekeringan dan risiko kebakaran hutan, kerusakan infrastruktur, serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

Tidak hanya itu, aksi kekerasan yang terus dilakukan oleh kelompok kriminal

bersenjata (KKB) di Papua juga menjadi perhatian DPR RI. "Pemerintah harus dapat mencari solusi dan strategi yang tepat untuk mengatasi situasi yang tidak aman dan aksi yang mengancam warga sipil bahkan aksi yang telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa, baik dari kalangan prajurit TNI maupun warga sipil," tuturnya.

Pada kesempatan itu ia juga mengungkapkan bahwa rakyat masih menaruh harapan besar terhadap kinerja para wakil rakyat yang dipilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. "Rakyat selalu menaruh harapan kepada lembaga DPR RI sebagai pembangun amanat konstitusional untuk menjalankan kedaulatan rakyat," kata Puan.

Hal ini mengingat para anggota DPR RI baru saja kembali dari masa reses di mana mereka bekerja di luar Gedung DPR dengan menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (dapil) masing-masing.

Adapun masa reses yang dimulai dari 14 April hingga 15 Mei 2023, sambung Puan, dilakukan untuk mendengarkan aspirasi rakyat sekaligus menyosialisasikan pelaksanaan fungsi-fungsi DPR RI dalam fungsi pengawasan, fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan diplomasi.

"Menjadi harapan rakyat bahwa DPR RI melalui fungsi-fungsinya dalam menjalankan kedaulatan rakyat dapat memberikan kehidupan rakyat yang semakin baik, semakin maju, semakin sejahtera dan semakin mudah," katanya. ● **han**

PENGUMUMAN
Likuidator PT PIC LOK STUDIOS (dalam Likuidasi), berkedudukan di Jakarta Pusat, (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa pelaksanaan pembebasan harta kekayaan dan kewajiban Perseroan sehubungan dengan proses Likuidasi telah diselesaikan sebagaimana mestinya dan laporan pertanggungjawaban dari Likuidator mengenai keseluruhan proses pelaksanaan dan penyelesaian Likuidasi telah disampaikan oleh Likuidator kepada seluruh Pemegang Saham dan diterima dengan baik oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang Diambil Di Luar Rapat PT PIC LOK STUDIOS (dalam Likuidasi) tertanggal 11 Mei 2023 Nomor 03, di buat dihadapan TRI FIRDAUS AKBARSAH, SH., MH., Notaris di Jakarta dan RUPS tersebut sekaligus memberikan penulisan dan pembebasan sepenuhnya kepada Likuidator (acquit et de charge) sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya selaku Likuidator Perseroan. Demikian hal ini diumumkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 162 ayat (3) Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Jakarta, 17 Mei 2023
Likuidator

PT ALANA RAYA ABADI
PENGUMUMAN PENGALIHAN SAHAM PERSEROAN
Direksi PT ALANA RAYA ABADI, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perseroan tertanggal 12 Mei 2023, telah diputuskan untuk menyetujui pengalihan seluruh saham-saham (pelepasan 100% saham) dalam Perseroan yang akan mengakibatkan beralihnya kendali Perseroan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang ada kaitannya dengan Perseroan, dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 14 hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan. Pengumuman ini dibuat dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 127 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Jakarta, 17 Mei 2023
Direksi Perseroan